

Analisis Determinan Kesejahteraan di Provinsi Sulawesi Selatan

Wiranto

Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar
Email : wirawiranto101096@yahoo.com

Basri Bado

Pembimbing I

Email : basri.bado@unm.ac.id

Syamsu Alam

Pembimbing II

Email : alamyin@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan per kapita, pendapatan asli daerah, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi terhadap kesejahteraan (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan data panel selama periode tahun 2009-2016 dengan metode regresi berganda dengan metode *Least Square Dummy Variables* (LSDV) dan Metode *fixed effect*. Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program Eviews 10.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan secara simultan variabel pendapatan per kapita, pendapatan asli daerah, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara parsial variabel pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan. pendapatan asli daerah, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan belanja pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kesejahteraan (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan hasil regresi menunjukkan bahwa sebesar 84.52% variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel Kesejahteraan (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : Pendapatan Per Kapitan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Belanja Ekonomi, dan Kesejahteraan.

Analysis of Determinants Welfare in South Sulawesi Province

Wiranto

Development Economic Study Program Economic Faculty State University of
Makassar

Email : wirawiranto101096@yahoo.com

Basri Bado

Mentor I

Email : basri.bado@unm.ac.id

Syamsu Alam

Mentor II

alamyin@yahoo.com

ABSTRAC

This study aims to analyze how much influence Per Capita Income, Regional Income, Education Expenditure, Health Expenditure and Economic Expenditure on Welfare (Human Development Indeks) of Regency/city in the Province of South Sulawesi. This research uses panel data during the period 2009-2016 with multiple regression methods using the Least Squares Dummy Variables (LSDV) method and fixed effect method. Calculation of data in this study using program eviews 10.

The results of this study indicate that simultaneously the variable per capita income, Regional Income, Education Expenditures, Health Expenditures and Economic Expenditures have a significant effect on Welfare (Human Development Indeks) in the Regency/City of South Sulawesi Province. Partially the variable Per Capita Income, Regional Income, Health Expenditures and Economic Expenditures have a positive and significant effect on Welfare (Human Development Indeks) in South Sulawesi Province. While education spending has a negative and not significant effect on Welfare variable (Human Development Indeks) in the Regency/City of South Sulawesi Province. The regression results show that 84.53% of the independent variables explain the Welfare variable (HDI) in the Regency/City of South Sulawesi Province, while the remaining 15.48% is influenced by other factors outside the model.

Keywords: Per Capita Income, Regional Income, Education Expenditures, Health Expenditures, Economic Expenditures, and Welfare.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dalam suatu negara atau daerah pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan suatu keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan manfaatnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan pendapatan per kapita yang positif dari tahun ke tahun menjadi indikator laju pertumbuhan ekonomi, di mana pendapatan akan meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat akan membelanjakan pendapatan yang diterima di sektor-sektor yang berdampak pada berputarnya roda perekonomian daerah. peningkatan aktivitas ekonomi akan memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah dalam bentuk setoran pajak yang akan digunakan daerah untuk membiayai pembangunan sarana prasarana umum dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (Yuniarti, 2008).

Dalam perencanaan pembangunan manusia yang dilakukan pastinya memerlukan dukungan dari pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang dijalankan langsung oleh daerah, tentu sangat bertopang dengan pendapatan daerah itu sendiri. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan pendapatan dalam hal ini PAD dan alokasi anggaran di sektor-sektor yang menunjang pembangunan manusia, diantaranya sektor pendidikan dan kesehatan.

Saat ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri. Hal tersebut dimulai sejak terjadinya desentralisasi keuangan melalui otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 (Christy dan Adi, 2009).

Setyowati dan Suparwati (2012) menyatakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif seperti melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program kepentingan publik. Adanya program-program untuk kepentingan publik diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008).

Belanja pemerintah harus mengarah kepada belanja pelayanan publik yaitu pengeluaran sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan pada suatu daerah. Selama ini, pemerintah daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasional dari pada belanja modal. Dalam memaksimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah akan membiayai pengeluaran publik melalui penerimaan daerahnya, sehingga pengeluaran publik suatu daerah pada era desentralisasi fiskal bergantung kepada penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan keuangan suatu daerah, penerimaan keuangan daerah bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

APBD disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya APBD maka suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sedangkan belanja dilakukan oleh daerah dalam bentuk belanja daerah (BPS, 2015)

Belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar

belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004).

Dalam prioritas belanja, peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan manusia dapat dicermati dari besar kecilnya IPM. Apabila IPM mengalami peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, pada gilirannya penduduk miskin menjadi semakin berkurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya (Widodo dkk, 2011).

IPM dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2009-2016, semua mengalami tren positif atau mengalami peningkatan indeks pembangunan manusia dari setiap tahunnya. IPM Kota Makassar berada pada peringkat pertama dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan sekaligus merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Parepare berada pada peringkat kedua dan Kota Palopo berada pada peringkat ketiga. Serta ada tiga daerah dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Takalar dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dilihat dari rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan, IPM Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Enrekang yang memiliki tingkat IPM yang lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Dari persentase IPM dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, kontribusi yang paling besar terhadap peningkatan IPM adalah komponen indeks kesehatan, dengan kontribusi terbesar kedua terhadap peningkatan IPM yaitu indeks pengeluaran serta terakhir adalah indeks pendidikan dengan kontribusi yang paling rendah (BPS, 2015).

Menurut Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan ini yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan. Namun seiring dengan peningkatan pengeluaran pemerintah pada APBD serta pelaksanaan otonomi daerah selama beberapa tahun, ternyata belum tampak perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data dari sumber kedua. Dalam bentuk panel data yang menggabungkan data *time series* periode 2009-2016 dan data *cross section* dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdiri dari data Kesejahteraan yang diukur dengan IPM, Pendapatan Per Kapita, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Belanja Ekonomi. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Pendapatan/PDRB Per Kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata di suatu negara atau daerah dibagi jumlah penduduk. PDRB dalam penelitian ini adalah PDRB atas harga berlaku. Satuan PDRB Per Kapita dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu pendapatan yang dimiliki daerah tersebut yang diperoleh dengan mengelola dan memanfaatkan potensi (sumber) kekayaan daerahnya yang dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah.
3. Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD untuk membiayai kegiatan pendidikan yang dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah.
4. Belanja Pemerintah di Sektor Kesehatan merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD untuk membiayai kegiatan kesehatan yang dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah.
5. Belanja Pemerintah di Sektor Ekonomi merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD untuk membiayai kegiatan ekonomi yang dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah.
6. Kesejahteraan adalah terpenuhinya hak-hak dasar atau kebutuhan masyarakat sehingga mencapai kualitas hidup yang layak. Kesejahteraan masyarakat ini diproksi dari pencapaian IPM yang menggambarkan tingkat perkembangan dan kemampuan sumber daya manusia pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang dinyatakan dalam persen (%).

Rancangan Analisis Data

1. Analisis Regresi Data Panel

Data panel (*pooled data*) merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu sedangkan data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Penelitian dengan menggunakan data panel dengan *cross section* 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan *time series* tahun 2009 sampai hingga tahun 2016. Secara ekonometrika model persamaan metode *fixed effect* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{LnIPM}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnPPK}_{it} + \beta_2 \text{LnPAD}_{it} + \beta_3 \text{LnBPP}_{it} + \beta_4 \text{LnBPK}_{it} + \beta_5 \text{LnBPE}_{it} + \beta_1 \text{D}_{1it} + \beta_2 \text{D}_{2it} + \beta_3 \text{D}_{3it} \dots + \beta_{24} \text{D}_{24it} + \mu_{it}$$

Keterangan :

W	= Indeks Pembangunan Manusia (%)
PPK	= Pedapatan Perkapita (Rp)
PAD	= Pendapatan Asli Daerah (Rp)
BPP	= Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan (Rp)
BPK	= Belanja Pemerintah di Sektor Kesehatan (Rp)
BPE	= Belanja Pemerintah di Sektor Ekonomi (Rp)
i	= Lokasi/tempat (24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan)

t	= Periode/waktu (2009-2016)
D ₁ , D ₂ ,..... D ₂₄	= Variabel <i>Dummy</i> 24 Kabupaten/Kota
α	= <i>Intercept</i> /konstanta
β ₁ , β ₂ , β ₃ , β ₄	= Koefisien regresi
μ	= <i>error term</i>

2. Model Estimasi dan Model Regresi Data Panel

Dalam melakukan estimasi regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan:

a. *Common Effect Model*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka bisa menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS), metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect*. Dalam pendekatan ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data antar daerah sama dalam berbagai kurun waktu. Persamaan model ini adalah sebagai berikut (Widarjono, 2009) :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

b. *Fixed Effect Model*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasikan dari perbedaan intersepnya. Teknik variabel *dummy* menangkap perbedaan intersep antar daerah namun intersep antar waktu sama. Selain itu juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar daerah dan waktu. Model estimasi ini menggunakan teknik *Least Squares Dummy Variable* (Widarjono, 2009) :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1it} + \beta_4 D_{2it} + \beta_5 D_{3it} + e_{it}$$

c. *Random Effect Model*

Model ini mengestimasi variabel gangguan (*error terms*) mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar daerah. Pada model ini perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing. Model ini sangat berguna jika individu yang diambil sebagai sampel dipilih secara random dan merupakan wakil dari populasi. Model yang tetap untuk mengestimasi *Random Effect* adalah teknik *Generalized Least Square* (GLS), berdasarkan persamaan model data panel di atas, model *random effect* dapat dimodifikasi sebagai berikut (Widarjono, 2009) :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + (e_{it} + \mu_i)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Persamaan Kesejahteraan

Dengan menggunakan data panel selama periode tahun 2009 sampai hingga tahun 2016. Menggunakan metode *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) dengan spesifikasi Model *fixed effect* (Gujarati, 2009). Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program Eviews 10 yang membantu dalam pengujian hipotesis secara parsial maupun secara simultan. Berikut ini hasil estimasi regresi data panel sebagai berikut :

Berdasarkan output model *fixed effect* pada lampiran 2 hasil analisis regresi data panel yang dengan menggunakan Eviews 10 pada, maka persamaan yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IPM_{it} = & 0.087 PPK_{1it} + 0.027 PAD_{2it} - 0.013 BPP_{3it} + 0.029 BPK_{4it} + 0.048 BPE_{5it} - 0.034122 D_{1t} \\ & - 0.051557 D_{2t} - 0.00902 D_{3t} - 0.134057 D_{4t} - 0.092336 D_{5t} - 0.082607 D_{6t} - 0.025467 \\ & D_{7t} - 0.017368 D_{8t} - 0.000556 D_{9t} + 0.025599 D_{10t} - 0.107188 D_{11t} - 0.007278 D_{12t} - \\ & 0.007232 D_{13t} + 0.017985 D_{14t} + 0.025383 D_{15t} + 0.027005 D_{16t} + 0.004390 D_{17t} - \\ & 0.058937 D_{18t} - 0.017315 D_{19t} + 0.079407 D_{20t} + 0.051375 D_{21t} + 0.153076 D_{22t} + \\ & 0.130806 D_{23t} + 0.130016 D_{24t} \end{aligned}$$

Dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki koefisien yang tertinggi dan yang terendah, dapat dilihat pada lampiran 3 di mana koefisien paling tertinggi terdapat di tiga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo. Sedangkan yang memiliki koefisien yang paling rendah terdapat di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Takalar, dan Gowa. Makin tinggi koefisien suatu individu atau daerah maka makin elastis variabel tersebut atau intervensi pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan persamaan regresi untuk masing-masing individu atau Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada lampiran 3, dilihat dari koefisien *slope* pada model *fixed effect* yang digunakan adalah tetap (konstan). Sedangkan koefisien intersep pada setiap individu atau Kabupaten/Kota berbeda. Perbedaan intersep ini disebabkan karena fitur khusus setiap Kabupaten/Kota, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, insentif, dan sebagainya (Astuti, 2010). Perbedaan intersep ini dapat mengindikasikan kemakmuran suatu daerah. Karena setiap daerah memiliki potensi dan sumber daya yang menjadi keunggulan tersendiri, sehingga setiap daerah atau Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan mampu saling melengkapi kekurangan yang terdapat di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Pembahasan Hasil

Berdasarkan hasil estimasi, selanjutnya dilakukan analisis pengaruh pendapatan per kapita, pendapatan asli daerah, belanja pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor ekonomi terhadap kesejahteraan dengan mengaitkan terhadap teori-teori ekonomi yang melandasi dan penelitian yang terkait sebelumnya.

a. Pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap Kesejahteraan

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien pendapatan per kapita sebesar 0.087465%, artinya jika terjadi kenaikan pendapatan per kapita sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan kesejahteraan (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.087465%. Nilai probabilitas pendapatan per kapita $0.0000 < 0.05$, sehingga pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan.

Secara teoritis, ini sejalan dengan teori Adolf Wagner yang menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat, semakin meningkatnya belanja pemerintah yakni meningkatnya fungsi kesejahteraan. Dan sejalan dengan model Todaro dan Smith yang mengatakan

bahwa pendapata per kapita berhubungan positif terhadap kesejahteraan sosial.

Koefisien pendapatan/PDRB per kapita memiliki koefisien yang tertinggi di antara koefisien variabel lain, seperti pendapatan asli daerah, belanja pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor ekonomi. Dengan adanya peningkatan pendapatan/PDRB per kapita akan langsung dirasakan masyarakat manfaatnya untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pengetahuannya, saat sedang sakit bisa langsung berobat ke Dokter atau Rumah Sakit. Peningkatan pendapatan/PDRB per kapita seseorang dapat meningkatkan daya belinya (konsumsi), guna peningkatan kualitas hidupnya. Hal ini bisa dilihat pada grafik 4.6 standar hidup layak Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang diukur dengan indeks pengeluaran (daya beli). Di mana dari tahun 2011 sampai hingga tahun 2016 standar hidup layak Kabupaten/Kota mengalami tren positif atau mengalami peningkatan. dan terdapat beberapa daerah yang memiliki standar hidup layak di atas Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Pinrang.

Norton (2002) menyatakan bahwa apabila pertumbuhan pendapatan/PDRB per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Secara ekonomi makro, pendapatan/PDRB per kapita dapat mempengaruhi kesejahteraan. Peningkatan pendapatan/PDRB per kapita akan meningkatkan standar hidup layak masyarakat sehingga daya beli juga mengalami peningkatan.

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kesejahteraan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien pendapatan asli daerah sebesar 0.027935%, artinya jika terjadi kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 1% akan meningkatkan kesejahteraan antar Kabupaten/Kota sebesar 0.027935%. Nilai probabilitas pendapatan asli daerah sebesar $0.0004 < 0.05$, sehingga variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Peningkatan kesejahteraan (IPM).

Berdasarkan hipotesis menunjukan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM. Pengaruh positif dan signifikan ini berarti semakin meningkat pendapatan asli daerah dan Belanja Modal, maka peningkatan IPM juga meningkat. Terjadinya peningkatan disebabkan oleh pengalokasian pendapatan asli daerah telah dimanfaatkan dengan tepat sehingga kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Meningkatnya pendapatan asli daerah akan berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya pendapatan asli daerah digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur untuk keperluan publik seperti, perbaikan sarana penunjang kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum. Suatu daerah dapat dikatakan berhasil mengelola segala potensi pendapatan asli daerah dibarengi dengan pengeluaran keseluruhan

pendapatan asli daerah tersebut untuk membiaya biaya modal sehingga tanpa disadari dapat menaikkan tingkat kesejahteraan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Ada baiknya apabila kesuksesan pemerintah daerah untuk meraih predikat suatu daerah dapat dikatakan mandiri harus mendapat penghargaan karena inilah gambaran dan tujuan dari diadakannya desentralisasi atau otonomi daerah.

c. Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Kesejahteraan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien belanja pendidikan sebesar -0.013717% , artinya jika terjadi penurunan belanja pendidikan sebesar 1% , akan menyebabkan penurunan kesejahteraan (IPM) antara Kabupaten/Kota sebesar -0.013717% . Nilai probabilitas belanja pendidikan $0.3327 > 0.05$, sehingga belanja pemerintah sektor pendidikan tahun 2009 sampai hingga tahun 2016 tidak signifikan terhadap kesejahteraan (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil ini berbeda dengan hipotesis dan teori yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan meningkat maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dan tidak sejalan dengan teori Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Belanja pendidikan yang relatif besar dan meningkat ini memberikan kesempatan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk membiayai pembangunan daerah khusus di sektor pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia. Selain itu, menurut teori *human capital* bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dapat meningkatkan kualitas penduduk. Namun dalam penelitian ini hasilnya bertentangan dengan teori, yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa belanja pendidikan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia daerah di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009-2016. Jika belanja pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya maka hal ini tidak akan berdampak terhadap kesejahteraan yang akan terjadi pada masing-masing daerah. Secara teoritis belanja pendidikan diberikan kepada daerah dalam rangka membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah di bidang pendidikan.

Data yang menunjukkan bahwa angka indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar 69.76% masih berada di bawah angka indeks pembangunan manusia ditingkat nasional yaitu sebesar 70.18% . Kemudian dapat kita lihat pada statistik pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016, Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir merupakan 10 provinsi dengan APS terendah dengan kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun (pendidikan dasar), yang dapat dibedakan menjadi 2

macam, yaitu Angka Partisipasi Murni (*Net Enrollment Ratio*) dan Angka Partisipasi Kasar (*Gross Enrollment Ratio*).

Angka Partisipasi Murni (APM) SD sebesar 96.90%, SLTP 73.63%, dan SLTA 59,57% dari penduduk usia sekolah. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa APM masing-masing jenjang pendidikan masih rendah. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sebesar 109.71%, SLTP 83.38%, dan SLTA 83.66% dari penduduk usia sekolah. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa APK masing-masing jenjang pendidikan masih rendah. Dari angka pencapaian APM dan APK menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka pencapaian angka partisipasinya semakin rendah. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi biaya yang diperlukan. ini menunjukkan bahwa pendidikan formal belum dirasakan oleh semua kalangan.

Dengan besarnya jumlah belanja pendidikan melalui adanya berbagai program bantuan dari pemerintah, seharusnya pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh penduduk. Namun kenyataannya belum semua penduduk dapat mengenyam pendidikan formal terutama pada kelompok penduduk miskin. Salah satu permasalahan pendidikan yang menghambat peningkatan kapabilitas dasar penduduk adalah mahal biaya pendidikan. Ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah yang berdampak pada pilihan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan yang sedang dijalani (putus sekolah).

Permasalahan selanjutnya, minimnya sarana belajar mengajar dan susah akses pelayanan pendidikan di kampung-kampung dan keterbatasan tenaga pendidik hal ini dibuktikan dengan angka buta huruf yang merupakan proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Terdapat 8.48% penduduk usia 15 tahun yang tidak dapat membaca dan menulis. Tingkat angka melek huruf di perkotaan lebih baik dibanding di kabupaten, seperti Kota Makassar 98.86%, Kota Palopo 96.61%, dan Kota Parepare 96.48% memiliki angka yang tertinggi. Namun sebaliknya Kabupaten Bantaeng 84.45%, Kabupaten Takalar 84.94%, dan Kabupaten Jeneponto 85.19%, justru menunjukkan angka melek huruf yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan menghadapi tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan ditingkat kabupaten. Hal ini disebabkan oleh proporsi belanja pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih besar terhadap belanja pegawai dibandingkan proporsi belanja terhadap kegiatan yang akan berdampak langsung pada peningkatan IPM.

Dapat dilihat pada porsi belanja barang dan modal untuk non-sekolah, yang diklasifikasikan sebagai belanja modal untuk non-sekolah adalah belanja modal yang manfaatnya bukan untuk sekolah, guru, dan siswa. Seperti yang dikemukakan oleh Bado (2017) besarnya belanja serta rata-rata pertumbuhannya setiap tahun selama 10 tahun terakhir pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya mengalami kenaikan antara 4%-9% pertahun, jika ditotalkan selama 10 tahun terakhir masing-masing daerah Kabupaten/Kota bervariasi antara 40%-90%. Terdapat beberapa daerah yang

memperoleh kenaikan belanja barang, jasa dan modal non-sekolah terbesar yakni sampai 90% selama 10 tahun terakhir atau rata-rata 9% pertahun.

Selain itu, belanja pendidikan merupakan belanja yang memiliki jumlah tertinggi dibandingkan dengan belanja kesehatan dan belanja ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana diketahui bahwa pengeluaran pemerintah atas pendidikan bersifat seperti investasi yang tidak dapat langsung memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang dikemukakan oleh Widodo (2011) dalam penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah di sektor publik dalam hal ini pendidikan, tidak dapat berdiri sendiri sebagai variabel independen. Variabel pengeluaran pemerintah harus berinteraksi dengan variabel lain. Selain itu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan yang akan menghasilkan perbaikan disektor pendidikan tidak dapat secara cepat mengubah kualitas angkatan kerja yang kemudian meningkatkan produktifitas kerja. Seharusnya menurut Todaro (2003) pengeluaran pemerintah yang ditujukan sebagai perbaikan modal manusia pada dasarnya merupakan suatu investasi.

d. Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Kesejahteraan

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien belanja kesehatan sebesar 0.029431%, artinya jika terjadi kenaikan belanja kesehatan sebesar 1% akan meningkatkan kesejahteraan antar Kabupaten/Kota sebesar 0.029431%. Nilai probabilitas variabel belanja kesehatan $0.0278 < 0.05$, sehingga menunjukkan bahwa belanja kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Safitri menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam menjelaskan dan mempengaruhi IPM di Provinsi Aceh. Aditia dan Dewi (2018) meneliti "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali tahun 2010-2015.

Secara teoritis, hasil ini didukung oleh teori Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat yang sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang dapat diukur dengan IPM. Hal ini menunjukkan, bahwa tingginya perhatian pemerintah dalam pengalokasian anggaran dan realisasi di sektor kesehatan sehingga indikator dasar kesehatan membaik.

Beberapa perbaikan telah tercapai dalam beberapa tahun terakhir walaupun kondisi lingkungan belum sepenuhnya sehat. Menurut BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015, sejauh ini 80% kelahiran telah ditolong oleh Dokter dan Bidan. Peningkatan setiap tahunnya menjadikan bukti bahwa akses fasilitas kesehatan semakin terjangkau. Namun, akses tersebut masih terasa sulit bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Semakin rendah pendapatan seseorang nampaknya akan semakin rendah pula

akses persalinan medis bagi mereka. Inilah salah satu tantangan yang perlu dikaji oleh pemerintah. Setiap tahunnya program kesehatan gratis selalu digalakkan oleh pemerintah Sulawesi Selatan. Anggaran pun yang digulirkan pemerintah setempat terus meningkat, terjangkaunya pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakatnya (BPS, 2015).

e. Pengaruh Belanja Ekonomi terhadap Kesejahteraan

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai koefisien belanja ekonomi sebesar 0.048637%, artinya jika terjadi kenaikan belanja ekonomi sebesar 1% akan meningkatkan kesejahteraan (IPM) antar Kabupaten/Kota sebesar 0.048637%. Nilai probabilitas belanja ekonomi $0.0006 < 0.05$, sehingga belanja ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan (IPM).

Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi meningkat maka akan meningkatkan Kesejahteraan (IPM). Hal ini memperkuat bahwa belanja ekonomi memberikan kontribusi yang meyakinkan terhadap kinerja perekonomian daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Aditia dan Dewi (2018) yang meneliti “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali tahun 2010-2015. Dan sejalan dengan model teori Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat yang sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang dapat diukur dengan IPM. Hal ini juga sejalan dengan teori Model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Ini menunjukkan tingginya perhatian pemerintah dalam pengalokasian anggaran dan realisasi di sektor ekonomi sehingga dapat menunjang kegiatan perekonomian.

Belanja pemerintah berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Belanja Pemerintah adalah semua pengeluaran kas pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah yang tersusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dan hasil yang direncanakan melalui program dan kegiatan. Belanja pemerintah yang tinggi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hal ini diungkapkan oleh BPS (2015) Penggunaan anggaran Pemerintah yang berorientasi pada kinerja memberikan implikasi dalam melakukan efisiensi dalam belanja selain mengoptimalkan penggalan sumber-sumber penerimaan dan ekstensifikasi sumber penerimaan baru bagi peningkatan pendapatan asli daerah selain mengoptimalkan penggalan sumber-sumber penerimaan dan ekstensifikasi sumber penerimaan baru bagi peningkatan pendapatan asli daerah juga meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan dalam rangka efisiensi dan efektifitas

pembangunan disertai dengan restrukturisasi dan reorganisasi kelembagaan untuk mendorong kinerja aparaturnya pembangunan.

Adanya belanja pemerintah dengan adanya pembangunan manusia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena belanja pemerintah yang tinggi akan berpengaruh terhadap pembangunan manusia yang akan meningkatkan perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Pendapatan asli daerah, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi berpengaruh positif dan signifikan atau interpretasi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan per kapita, pendapatan asli daerah, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan belanja pendidikan disimpulkan bahwa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

REFERENSI

- Aditia, N. M. A. dan Dewi, N. P. M. (2018). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali*. *E-Jurnal: Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 7, No. 2.
- Astuti, Mulya, Alfira. (2010). *Fixed Effect Model pada Regresi Data Panel*. Institut Agama Islam Negeri Mataram. Vol. 3, No. 2.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Berita Resmi Statistik*. No. 67/11/73/Th.IX, 5 November 2015.
- _____. (2015). *Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik*.
- Bado Basri, dkk. (2017). *Model Kebijakan Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi*. Makassar: Carabaca Cetakan I.
- Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. (2009). *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*. *The 3rd National Conference UKWMS Surabaya*.

- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Makalah.
- Norton, Cebula. (2002). *The Impact of Economic Freedom on Per Capita Real GDP: A Study of OECD Nations*. *JRAP*. 43(1): 34-41.
- Setyowati, L. & Suparwati, Y. K. (2012). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. Pretasi. Juni 2012, 9 (1), h: 113-133.
- Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Jakarta: Penerbit Erlangga..
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: Ekonosia.
- Widodo, dkk. (2011). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal: Dinamika Ekonomi Pembangunan* Vol. 01, No. 01.

